

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Negara Indonesia berdasarkan posisi geografisnya memiliki batas-batas wilayah yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan negara Australia, Timor Leste dan Samudera Hindia.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini, dan Samudera Pasifik.

Batas-batas tersebut ada pada 111 pulau terluar yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik. Pulau-pulau tersebut digunakan untuk menentukan garis pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan, yaitu:

1. Pulau Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.
2. Kepulauan Riau yaitu Kepulauan Riau.
3. Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pulau Jawa meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

5. Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil) terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
6. Pulau Kalimantan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
7. Pulau Sulawesi meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
8. Kepulauan Maluku terdiri dari Maluku dan Maluku Utara.
9. Pulau Papua terdiri dari Papua dan Papua Barat.

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki ribuan pulau dan terhubung oleh berbagai selat dan laut. Saat ini, pulau yang berkoordinat dan terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa berjumlah 13.466 pulau.

B. Gambaran Umum Variabel Operasional

1. Produk Domestik Bruto

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNN 2008).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB dari sisi lapangan usaha

merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu:

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk

memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

b. Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).

Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) meliputi pengeluaran LNPRT yang beroperasi di Indonesia. LNPRT merupakan lembaga formal maupun informal yang dibentuk oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan barang/jasa secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi kepada anggotanya/rumah tangga/kelompok masyarakat. LNPRT terlibat dalam produksi nonpasar dan tidak dikendalikan oleh pemerintah.

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, adapun ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang

dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non-rivalry*, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Nonexcludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

d. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden).

e. Impor Barang dan Jasa

Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

PDB merupakan salah satu indikator yang sering kali dipakai sebagai ukuran kesejahteraan dari suatu negara. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Hal ini berarti PDB ini merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam periode satu tahun. Pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun 1987-2017 disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4. 1
Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 1987-1997
(dalam Milyar rupiah)

Tahun	PDB	Tahun	PDB	Tahun	PDB
1987	2.353.133,40	1998	3.952.189,00	2009	6.563.523,70
1988	2.489.156,30	1999	4.001.061,00	2010	6.864.133,10
1989	2.674.762,40	2000	4.197.917,10	2011	7.287.635,50
1990	2.868.472,20	2001	4.442.798,10	2012	7.727.083,40
1991	3.067.838,40	2002	4.538.187,70	2013	8.158.193,80
1992	3.266.002,20	2003	4.755.129,80	2014	8.568.155,60
1993	3.478.172,50	2004	4.994.354,40	2015	8.982.511,30
1994	3.740.425,70	2005	5.278.770,10	2016	9.433.034,40
1995	4.047.889,00	2006	5.569.539,30	2017	9.904.685,10
1996	4.364.354,20	2007	5.921.330,70		
1997	4.578.441,00	2008	6.278.127,50		

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

2. Suku Bunga

Suku bunga SBI adalah suku bunga dari surat berharga pengakuan hutang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank indonesia. Tingkat suku bunga SBI selalu berfluktuasi sesuai dengan kebijakan Dewan Gubernur Bank Indonesia disesuaikan dengan keadaan perekonomian Indonesia.

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate*, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan *best practice internasional* dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. *Instrumen BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.

Dengan penggunaan instrumen BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan. **Pertama**, menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reverse*) *Repo Rate* 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. **Kedua**, meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. **Ketiga**, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.

Data terbaru *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan baru oleh Bank Indonesia dari bulan Januari 2018 – Maret 2019 seperti tercantum dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* (Suku Bunga Kebijakan) terendah terjadi pada tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 sebesar 4,25%, sedangkan yang tertinggi secara berturut-turut terjadi pada tanggal 15 November 2018, 20 Desember 2018, 17 Januari 2019, 21 Februari 2019, dan 21 Maret 2019 sebesar 6,00%.

Tabel 4. 2
Data BI 7-day (Reverse) Repo Rate (Suku Bunga Kebijakan) Bulan Januari 2018-Maret 2019

Tanggal	BI 7-day (%)
21 Maret 2019	6,00
21 Februari 2019	6,00
17 Januari 2019	6,00
20 Desember 2018	6,00
15 November 2018	6,00
23 Oktober 2018	5,75
27 September 2018	5,75
15 Agustus 2018	5,50
19 Juli 2018	5,25
29 Juni 2018	5,25
30 Mei 2018	4,75
17 Mei 2018	4,50
19 April 2018	4,25
22 Maret 2018	4,25
15 Februari 2018	4,25
18 Januari 2018	4,25

Sumber: *Bank Indonesia, 2019*

Tingkat suku bunga adalah satu dari variabel yang bisa mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Secara umum, metodenya yaitu bahwa tingkat suku bunga dapat berpengaruh terhadap suku bunga deposito yang menjadi salah satu alternatif bagi penanam

modal dalam pengambilan keputusan ketika berinvestasi. Jika tingkat suku bunga yang ditentukan mengalami kenaikan, maka pemilik modal bisa menerima pendapatan yang cukup besar atas suku bunga deposito yang diinvestasikan jadi, pemilik modal lebih memilih untuk menyetorkan dananya dari pada berinvestasi dalam saham.

Sebagai komponen yang dapat mendorong investasi maka suku bunga haruslah rendah. Rendahnya suku bunga dapat mendorong investor untuk melakukan pinjaman pada lembaga perbankan dan dengan demikian akan mendorong masuknya investasi karena kreditor dapat mengembalikan sejumlah dana dan bunga dengan jumlah yang relatif rendah. Sebaliknya jika tingkat suku bunga semakin tinggi, maka investor cenderung melarikan dana investasinya dari Indonesia ke negara lain yang mempunyai tingkat suku bunga yang lebih rendah. Adapun pertumbuhan suku bunga di Indonesia tahun 1987-2017 disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Pertumbuhan Suku Bunga Indonesia Tahun 1987-1997
(dalam persen)

Tahun	SB	Tahun	SB	Tahun	SB
1987	15,20	1998	51,67	2009	6,87
1988	16,99	1999	23,97	2010	6,83
1989	17,76	2000	11,16	2011	6,35
1990	18,12	2001	14,54	2012	5,58
1991	18,12	2002	12,81	2013	7,92
1992	20,55	2003	6,62	2014	8,58
1993	18,27	2004	6,43	2015	7,60
1994	12,42	2005	11,98	2016	4,75
1995	16,72	2006	8,96	2017	4,25
1996	16,92	2007	7,19		
1997	23,01	2008	10,75		

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa tingkat suku bunga paling tinggi terjadi pada tahun 1998. Hal ini diakibatkan karena adanya krisis moneter di Indonesia. Setelah terjadinya krisis moneter tingkat suku bunga semakin tinggi yaitu diatas 10% yang terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, dan 2008. Tingginya suku bunga pada periode 1999-2005 dapat memperbesar beban biaya bagi investor, sehingga cenderung mengakibatkan turunnya investasi di Indonesia. Mulai tahun 2009 sampai dengan 2017, perkembangan suku bunga mengalami fluktuasi yang secara relatif tidak terlalu besar yaitu di bawah 10%.

3. Nilai Tukar (Kurs)

Kurs adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah rupiah terhadap dolar Amerika yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Kurs yang umumnya digunakan di Indonesia ialah Kurs Transaksi BI yang disajikan dalam bentuk kurs jual dan kurs beli valas terhadap rupiah, digunakan sebagai acuan transaksi BI dengan pihak ketiga seperti pemerintah. Titik tengah Kurs Transaksi BI USD/IDR menggunakan Kurs Referensi dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). JISDOR merupakan harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi USD/IDR terhadap rupiah antar bank di pasar valuta asing Indonesia, melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real time. Data terbaru yang diterbitkan oleh BI mengenai kurs transaksi dapat dilihat pada gambar 4.1.

Tabel 4. 4
Pergerakan Kurs Rupiah Terhadap USD Tahun 1987 – 2019

Tahun	Kurs	Tahun	Kurs	Tahun	Kurs
1987	1.650,00	1998	8.025,00	2009	10.408,00
1988	1.729,00	1999	7.100,00	2010	9.087,00
1989	1.795,00	2000	9.595,00	2011	8.700,00
1990	1.901,00	2001	10.400,00	2012	9.387,00
1991	1.992,00	2002	8.940,00	2013	10.461,00
1992	2.062,00	2003	8.465,00	2014	11.865,00
1993	2.110,00	2004	9.290,00	2015	13.389,00
1994	2.200,00	2005	9.705,00	2016	13.503,00
1995	2.308,00	2006	9.164,00	2017	13.616,00
1996	2.383,00	2007	9.140,00		
1997	4.650,00	2008	9.691,00		

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar (kurs) mata uang rupiah terhadap dollar Amerika (USD) pada tahun 1987 sebesar 1.650,00 rupiah per dollar Amerika secara terus menerus melemah sampai pada tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi menjadi 8.025,00 rupiah per dollar Amerika. Peristiwa merosotnya nilai tukar rupiah ini mengakibatkan banyak dana investasi yang ditarik kembali oleh investor asing dari Indonesia dan dialihkan ke negara lain. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah merosotnya nilai tukar rupiah tersebut dengan cara menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas (Simorangkir, 2004), namun kebijakan ini gagal untuk mengurangi laju kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Setelah peristiwa krisis ekonomi berlalu, maka nilai kurs rupiah mulai menguat atau membaik pada tahun 2003 berkisar 8.465,00 rupiah per dollar, namun pada tahun 2004 terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung

terus merosot tajam atau anjlok pada posisi 13.616,00 rupiah per dollar Amerika Serikat di tahun 2017.

4. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing (PMA) merupakan pemindahan modal dari suatu negara ke negara lain. Modal yang dialirkan dari negara satu ke negara lainnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan juga lebih produktif, yang hasilnya nanti diharapkan dari aliran modal internasional atau modal asing ini adalah untuk meningkatkan output dan kesejahteraan di suatu negara. Selain membawa keuntungan berupa kesejahteraan bagi masyarakat, adanya penanaman modal asing juga dapat membawa teknologi yang lebih mutakhir kepada Negara tujuan investasi, dan dengan datangnya teknologi yang lebih canggih maka produktivitas akan meningkat karena tingkat efisiensi produksi dapat meningkat akibat adanya alat produksi yang lebih canggih. Adanya penanaman modal asing juga dapat meningkatkan daya saing pada Negara tujuan investasi, dan dengan meningkatnya daya saing, para produsen akan berlomba-lomba untuk terus meningkatkan inovasinya dalam hal produksi. Di Indonesia peraturan tentang penanaman modal asing sebenarnya sudah di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, namun pada tahun 1970 peraturan terkait penanaman modal asing di perbarui, hal ini dapat dilihat dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan, hingga pada tahun 2007 peraturan ini kembali diperbarui, dengan adanya

undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal atau investasi, serta diatur dengan peraturan presiden nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha terbuka dan tertutup dengan persyaratan dibidang penanaman modal sebagaimana peraturan presiden nomor 111 tahun 2007 tentang perubahan peraturan atas persetujuan presiden nomor 77 tahun 2007, dan yang terakhir ditambahnya dengan perpres nomor 36 tahun 2010 tentang bidang usaha terbuka dan tertutup dengan persyaratan terkait penanaman modal itu sendiri.

Penanaman modal asing di Indonesia yang dinyatakan mengalami perkembangan yang tidak terlalu signifikan, dan cenderung berfluktuatif seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa penanaman modal asing di Indonesia tahun 2013 sebesar 28.617,5 juta US\$, tahun 2014 menurun menjadi 28.529,7 juta US\$, tahun 2015 meningkat menjadi 29.275,9 juta US\$, tahun 2016 turun menjadi 28.964,1 juta US\$, serta tahun 2017 naik menjadi 32.239,8 juta US\$.

Data terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik mengenai realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia periode tahun 2013 – 2017 disajikan pada Gambar 4.2.

29,5 persen (YoY); 32,4 persen (YoY) dan 4,7 persen (YoY) pada sektor primer, sekunder dan tersier.

Data mengenai realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia periode tahun 1987 – 2017 disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 5
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia
Tahun 1987-1997(dalam Juta US\$)

Tahun	PMA	Tahun	PMA	Tahun	PMA
1987	1.239,70	1998	39.047,24	2009	162.148,00
1988	1.279,88	1999	58.432,29	2010	194.745,00
1989	1.304,76	2000	94.773,65	2011	245.647,00
1990	1.342,11	2001	36.497,76	2012	286.175,00
1991	2.110,92	2002	27.558,44	2013	285.297,00
1992	4.002,14	2003	46.094,46	2014	292.759,00
1993	11.928,04	2004	42.480,38	2015	289.641,00
1994	8.296,64	2005	87.595,13	2016	289.641,00
1995	15.459,91	2006	59.770,00	2017	322.398,00
1996	11.029,00	2007	148.714,00		
1997	16.151,31	2008	108.152,00		

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2019*

Tabel 4.3 di atas menunjukkan fluktuasi penanaman modal asing dari tahun ke tahun seiring dengan situasi ekonomi di Indonesia dan dunia internasional. Fluktuasi penanaman modal asing mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan nilai investasi ini mencapai puncaknya pada tahun 2017 sebesar US\$ 322.398,00 juta. Pada tahun 2000 penanaman modal asing (PMA) di Indonesia sebesar US\$ 94.773,65 juta mengalami penurunan tajam sebesar 61,49% menjadi US\$ 36.497,76 juta pada tahun 2001. Tahun 1999 nilai investasi PMA hanya US\$ 10890,4 juta dan mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2002 sebesar US\$ 9795,4 juta. Penurunan investasi tersebut disebabkan oleh krisis

ekonomi yang parah dan iklim berusaha atau iklim bisnis yang sangat buruk akibat gejolak-gejolak sosial dan politik selama tahun 1997-2002 yang tidak dapat memberikan keamanan dan ketidakpastian dalam melakukan bisnis bagi pengusaha atau investor asing.